



Judul	: Komisi IV Nanya, Anggaran Kementerian Kok Dipangkas Lagi
Tanggal	: Jumat, 11 Juni 2021
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 7

Komisi IV Nanya, Anggaran Kementerian Kok Dipangkas Lagi

ANGGOTA Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin menyalangkan kembali turunnya anggaran pagu indikatif untuk Kementerian Pertanian (Kementan) pada tahun 2022 sebesar Rp 14,51 triliun. Padahal, petani membutuhkan dukungan anggaran untuk memaksimalkan produksi pertanian di masa pandemi.

“Mestinya anggaran Kementan itu tetap di atas Rp 30 triliun seperti 10 tahun terakhir sebelum tahun 2020,” kata Andi Akmal dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Pemangkasan itu berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-361/MK.02/2021 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B.238/M. PPN/D.8/PP/04.02/04/2021. Bawa, pagu indikatif Kementerian Tahun 2022 sebesar Rp 14,51 triliun.

Angka ini turun dari pagu indikatif Kementerian di Tahun 2021 sebesar Rp 15,51 Triliun. Bagi Andi, hal ini cukup memprihatinkan karena turun signifikan dari periode pertama pemerintahan Jokowi di mana alokasi belanja Kementerian selalu di atas Rp 30 triliun.

“Anggaran Kementerian pernah mencapai antara Rp 32 triliun hingga Rp 33 triliun, itu belum subsidi pupuk yang angkanya bisa lebih besar. Mengingat sektor ini sangat produktif meski dalam kondisi pandemi termasuk dalam sejarah Indonesia, ketika krisis pun sektor pertanian sangat bertahan”, tutur Akmal.

Politisi PKS ini mengingatkan, negara ini pernah mengalami krisis moneter yang sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Inflasi terjadi cepat, pesat dan tinggi. Pengangguran mendadak besar karena banyak sektor usaha terpukul dan terpuruk jatuh.

Namun sektor pertanian bisa tampil sebagai penyelamat perekonomian negara dimana mampu menampung kembali tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan di perkotaan. “Saat pandemi yang juga memukul berbagai sektor usaha pun, ada peran sektor pertanian sebagai setor penyangga (*buffer sector*) di masa krisis,” sebut Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menekankan, sektor pertanian adalah sektor penopang ketahanan pangan (*food security*) yang akan krusial di kala krisis ekonomi. Karena menjadi penopang ketahanan pangan, maka bukan hanya memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan untuk bertahan hidup saja, tapi juga menjadi pemeran penting dalam menjaga asupan gizi masyarakat.

Krisis moneter 1997/1998, tegas Akmal, meninggalkan generasi yang mengalami *stunting* dan *malnutrition* yang cukup parah di kalangan anak-anak. Ini berdampak permanen.

“Jangan sampai kita melakukan kesalahan dua kali dalam menghadapi krisis dengan mengabaikan sektor pertanian dengan memangkas lebih separuh anggaran yang pernah ada di Kementerian,” dia mengingatkan. ■ KAL